

Good Governance Memediasi Peran Pengawasan Laporan Keuangan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Senda Yunita Leatemia¹, Yana Mustika²

Program Studi Akuntansi, Universitas Pattimura^{1,2}

Email Korespondensi: senda.leatemia@feb.unpatti.ac.id, yana.mustika@lecturer.unpatti.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the mediating role of good governance in the relationship between financial report oversight and competence on the performance accountability of Local Government Agencies (Organisasi Perangkat Daerah/OPD). A total of 100 respondents were selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using path analysis with the assistance of SmartPLS version 4. The findings reveal that both financial report oversight and human resource competence have a positive and significant effect on performance accountability. Furthermore, good governance plays a crucial mediating role, strengthening the relationship between financial oversight, competence, and accountability. These results highlight that the integration of good governance principles not only enhances financial oversight and human resource capabilities but also serves as a key determinant in fostering transparent, accountable, and performance-oriented local governance

Keywords: *Good Governance, Financial Report Oversight, Competence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *good governance* memediasi pengaruh pengawasan laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 114 responden ditetapkan sebagai sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan *path analysis* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD. Selain itu, *good governance* terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara pengawasan, kompetensi, dan akuntabilitas kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya mendukung efektivitas pengawasan dan peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja

Kata Kunci: *Good Governance, Pengawasan Laporan Keuangan, Kompetensi*

PENDAHULUAN

Di era pemerintahan modern, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin kuat. Masyarakat berharap pemerintah mampu bekerja dengan jujur, terbuka, dan efisien dalam mengelola sumber daya publik. Konsep *good governance* hadir sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi menjadi fondasi penting agar pemerintah mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan (Pamungkas, 2012). Penerapan otonomi daerah sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahkan menegaskan bahwa laporan keuangan yang baik harus andal, relevan, dapat dipahami, dan bisa dibandingkan.

Kenyataannya, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih sering menjadi sorotan. Evaluasi Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas. Kota Ambon, misalnya, sempat berada pada predikat CC (Cukup Baik) di tahun 2014–2016, dan meningkat ke B (Baik) di periode 2017–2021. Meskipun ada perbaikan, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa kinerja OPD belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan masyarakat. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas ini. Pertama, pengawasan laporan keuangan. Laporan yang sesuai standar dan diawasi dengan baik akan memudahkan publik menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya (Marlena, 2018). Kedua, kompetensi SDM. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional jelas akan lebih mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal (Purwanto, 2015; Ramadhania & Novianty, 2020).

Pengawasan dan kompetensi saja tidak cukup tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Di sinilah peran *good governance* menjadi sangat penting. *Good governance* berfungsi sebagai jembatan agar pengawasan dan kompetensi SDM tidak hanya sebatas prosedural, tetapi benar-benar mengarah pada pencapaian nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan pada aturan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menguji secara empiris peran *good governance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengawasan laporan keuangan dan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja OPD di Kota Ambon. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang akuntabilitas sektor publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Penelitian oleh Kusuma dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas organisasi sektor publik. Sementara itu, Wibowo (2019) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih mampu menjalankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain oleh Pratiwi dan Setiawan (2021) menemukan bahwa *good governance* dapat berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi jembatan penting yang mengubah kompetensi dan pengawasan keuangan menjadi kinerja yang akuntabel. Sejalan dengan itu, Putra dan Yuliani (2022) menunjukkan bahwa pengawasan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Artinya, pengawasan dan kompetensi tidak hanya berdampak langsung terhadap kinerja, tetapi juga secara tidak langsung melalui mekanisme tata kelola yang baik. Dengan demikian, berbagai temuan terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pengawasan, kompetensi, dan *good governance* dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah. Namun, masih terdapat variasi hasil dalam konteks empiris, khususnya terkait peran mediasi *good governance*, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali model hubungan tersebut pada lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut: (H1) Pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah; (H2) Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah; (H3) Pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *good governance*; (H4) Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap *good governance*; (H5) *Good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah; (H6) *Good governance* memediasi hubungan antara pengawasan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah; serta (H7) *Good governance* memediasi hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh pengawasan laporan keuangan dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dengan *good governance* sebagai variabel mediasi. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara empiris melalui data numerik yang terukur. Instrumen utama penelitian adalah kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teoretis dari setiap

variabel penelitian. Responden penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu aparatur yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan laporan keuangan di lingkungan OPD Kota Ambon. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang relevan dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2019). Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 114 responden yang berasal dari 38 OPD di Kota Ambon, dengan sebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada unit-unit kerja terkait untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *path analysis* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel laten serta menilai peran mediasi *good governance* dalam model penelitian. Evaluasi model meliputi dua tahap, yaitu *outer model* untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta *inner model* untuk menganalisis hubungan struktural antarvariabel. Hasil analisis diuji berdasarkan nilai *R-squared*, *t-statistics*, dan *p-values* untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh antarvariabel. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan bukti empiris yang kuat mengenai peran *good governance* sebagai variabel penghubung antara pengawasan laporan keuangan dan kompetensi aparatur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan terkait dengan variabel penelitian. Setelah jangka waktu tertentu, kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya diolah. Setiap jawaban yang diperoleh diubah menjadi bentuk numerik sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan guna keperluan analisis statistik. Sebanyak 114 kuesioner disebarkan kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Dari jumlah tersebut, 102 kuesioner berhasil dikembalikan dan seluruhnya terisi dengan lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai data valid untuk tahap analisis selanjutnya. Rincian mengenai distribusi dan tingkat pengembalian kuesioner disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Sebaran Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner Tersebar	114
Kuesioner yang tidak kembali	12
Kuesioner yang dapat diolah	102

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan kuesioner yang diperoleh profil responden. Profil responden berisi identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban atas

pertanyaan kuesioner. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan yang akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Keterangan	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	60	58.82%
	Wanita	42	41.18%
	Total	102	100%
Usia	≤ 30	-	-
	31 - 35	-	-
	36 - 40	19	18.62%
	41- 45	46	45.10%
	≥46	37	36.28%
	Total	102	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	-	-
	Diploma	-	-
	Sarjana	90	88.23%
	Magister	12	11.77%
	Total	102	100%

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel karakteristik responden di atas, data jenis kelamin diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 60 orang (58,82%), sedangkan 42 orang (41,18%) lainnya merupakan perempuan. Sementara itu, pada karakteristik usia responden, hasil menunjukkan bahwa kelompok usia 41–45 tahun merupakan yang paling dominan, dengan jumlah 46 orang (45,10%). Kelompok berikutnya adalah responden dengan usia di atas 46 tahun, yaitu sebanyak 37 orang (36,28%), sedangkan sisanya tersebar pada kelompok usia lainnya. Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan sarjana (S1), yaitu sebanyak 90 orang (88,23%), diikuti oleh responden dengan pendidikan magister (S2) sebanyak 12 orang (11,77%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang relevan dengan konteks penelitian.

2. Pengujian Outer Model / Measurement

Pada pembahasan ini data ditelaah dengan metode *Partial Least Squares* (PLS) dan *software smartPLS 4.0*. *Partial Least Squares* (PLS) adalah model persamaan struktural berbasis varians (SEM). *Partial Least Squares* (PLS) tidak memerlukan asumsi distribusi yang tepat untuk estimasi parameter, teknik parametrik tidak diperlukan untuk mengevaluasi signifikansi (Ghazali dan Latan, 2015). Dalam *Partial Least Squares* (PLS), model dievaluasi melalui *outer model* dan *inner model*. Validitas diskriminan dan reliabilitas komposit merupakan dua ukuran yang digunakan dalam evaluasi outer model ketika menerapkan metode analisis data

menggunakan SmartPLS. Hasil pengujian validitas diskriminan disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 3. Fornell-Larcker criterion

Variabel	Akuntabilitas Kinerja OPD'	Good Governance	Kompetensi	Pengawasan LK
Akuntabilitas Kinerja OPD	0.873			
Good Governance	0.852	0.871		
Kompetensi	0.844	0.853	0.888	
Pengawasan LK	0.812	0.795	0.831	0.925

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel *Fornell-Larcker Criterion*, diketahui hasil pengujian validitas diskriminan bahwa nilai akar kuadrat AVE yang diperoleh ialah 0.873, 0.871, 0.888, 0.925. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk. Selanjutnya, tahap akhir dalam evaluasi *outer model* adalah memeriksa nilai uni-dimensionalitas untuk memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan dalam pengukuran. Pengujian uni-dimensionalitas dilakukan melalui indikator reliabilitas komposit dan nilai *Cronbach's alpha*, yang masing-masing memiliki nilai ambang batas sebesar 0,70. Hasil pengujian reliabilitas komposit dan *Cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 4. Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Composite reliability (<i>rho_a</i>)	Composite reliability (<i>rho_c</i>)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas Kinerja OPD'	0.937	0.939	0.949	0.726
Good Governance	0.906	0.911	0.930	0.728
Kompetensi	0.945	0.950	0.957	0.789
Pengawasan LK	0.966	0.967	0.973	0.856

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai *Cronbach's alpha*, *Composite Reliability* dan nilai *Average Variance Extracted* lebih tinggi dari 0.70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak memiliki masalah reliabilitas/*unidimensionalitas*.

3. Pengujian Inner Model

Setelah *outer model* dinyatakan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, tahap selanjutnya dalam analisis menggunakan Partial Least Squares (PLS) adalah melakukan pengujian inner model atau model struktural. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk laten yang telah ditetapkan dalam model penelitian, serta untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Evaluasi inner model mencakup pengujian terhadap beberapa indikator utama, seperti koefisien determinasi (R-Squared), uji

signifikansi (t-statistics dan p-values), serta nilai prediktif relevansi (Q-Squared). Melalui tahapan ini, dapat diketahui tingkat kekuatan, arah, dan signifikansi hubungan antar konstruk, sehingga memberikan dasar empiris dalam menilai kesesuaian model teoritis dengan data yang diobservasi.

Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-Squared) pada variabel independen bersama dengan hasil uji t digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan model struktural dalam penelitian ini. Nilai hasil pengujian R-Squared secara rinci disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 5. Pengujian Koefisien Determinasi

	Nilai <i>R-square adjusted</i>
Akuntabilitas Kinerja OPD'	0.803
Good Governance	0.770

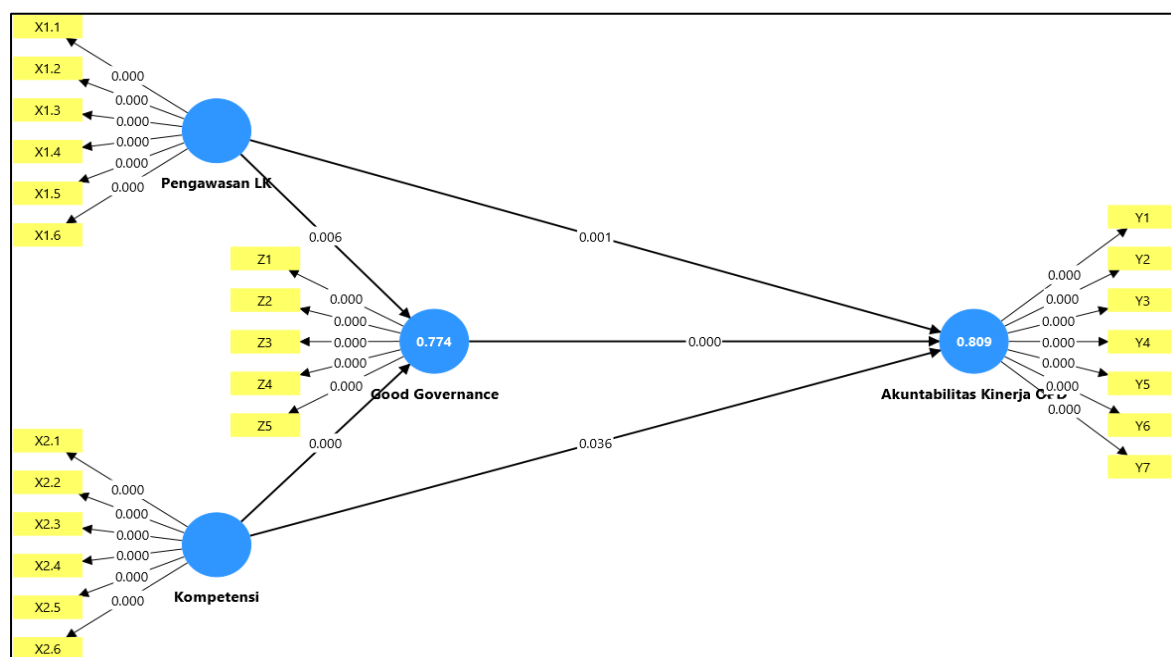
Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian inner model, nilai *R-Square Adjusted* untuk variabel Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 0,803, sedangkan untuk variabel *Good Governance* sebesar 0,770. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang kuat terhadap variabel endogen.

Secara lebih rinci, nilai *R² adjusted* = 0,803 pada variabel Akuntabilitas Kinerja OPD mengindikasikan bahwa sebesar 80,3% variasi dalam akuntabilitas kinerja OPD dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk independen dalam model, sedangkan sisanya 19,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sementara itu, nilai *R² adjusted* = 0,770 pada variabel *Good Governance* menandakan bahwa 77,0% variabilitas *Good Governance* dapat diterangkan oleh variabel-variabel yang memengaruhinya dalam model penelitian. Mengacu pada kriteria interpretasi nilai *R-Square* menurut Chin (1998) – yakni 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah) – maka kedua nilai *R²* tersebut termasuk dalam kategori kuat, yang berarti model struktural memiliki kemampuan prediktif yang baik serta hubungan antar konstruk laten bersifat substansial.

Pengujian Koefisien Determinasi

Hasil koefisien jalur (Mean, STDEV, dan T-Statistics) digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis. Dalam tahap ini, nilai koefisien parameter dan t-statistic dianalisis untuk menilai sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Prosedur pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik bootstrapping, yang menghasilkan nilai t-statistic sebagai acuan untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Pada uji dua arah, nilai t-tabel ditetapkan sebesar 1,660. Apabila nilai t-hitung \leq t-tabel, maka H_0 diterima; sebaliknya, jika t-hitung $>$ t-tabel, maka H_0 ditolak. Hasil lengkap mengenai koefisien jalur beserta nilai t-statistic untuk masing-masing hubungan antar variabel disajikan pada gambar dan tabel 7 di bawah ini:



Sumber: data primer diolah, 2025

Gambar 1. Model Struktural

Tabel 6. Hasil Pengujian Inner Model

Model Penelitian	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
Pengawasan LK → Akuntabilitas Kinerja OPD	0.243	0.250	0.080	3.029	0.001
Kompetensi → Akuntabilitas Kinerja OPD	0.204	0.196	0.113	1.801	0.036
Pengawasan LK → Good Governance	0.230	0.240	0.092	2.489	0.006
Kompetensi → Good Governance	0.679	0.669	0.093	7.297	0.000
Good Governance → Akuntabilitas Kinerja OPD	0.503	0.502	0.094	5.373	0.000
Pengawasan LK → Good Governance → Akuntabilitas Kinerja OPD	0.116	0.120	0.051	2.259	0.012
Kompetensi → Good Governance → Akuntabilitas Kinerja OPD	0.342	0.337	0.081	4.226	0.000

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil penelitian ini dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0, dengan setiap hubungan antarvariabel diuji berdasarkan model teoretis yang telah disimulasikan sebelumnya. Prosedur *bootstrapping* diterapkan pada sampel penelitian dengan tujuan untuk meminimalkan potensi bias akibat distribusi data yang tidak normal. Adapun hasil analisis model melalui pendekatan SmartPLS dengan metode *bootstrap* disajikan pada pembahasan di bawah ini.

Pengawasan Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah. Hal tersebut diketahui dari nilai $O = 0.243$; $t = 3.029$; dan $p = 0.001$. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin optimal pengawasan terhadap laporan keuangan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh OPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Halim dan Abdullah (2020) yang menemukan bahwa efektivitas pengawasan keuangan publik meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Selain itu, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa sistem pengawasan yang baik akan menekan praktik penyimpangan dan memperkuat budaya akuntabilitas dalam organisasi pemerintah. Dengan demikian, pengawasan laporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Nilai *path coefficient* menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja OPD. Hal tersebut diketahui dari nilai $O = 0.204$; $t = 1.801$; $p = 0.036$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme aparatur mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Temuan ini mendukung penelitian Nugraha dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi pegawai publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sofyani (2019) bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor dominan dalam menciptakan akuntabilitas manajerial sektor publik. Dengan demikian, kompetensi bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis, tetapi juga mencakup integritas moral dan pemahaman terhadap nilai-nilai akuntabilitas publik.

Pengawasan Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Good Governance Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif Terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil uji, pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dengan nilai $O = 0.230$; $t = 2.489$; dan nilai $p = 0.006$. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan menjadi landasan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini mendukung studi Rinaldi dan Pratama (2020) yang menegaskan bahwa sistem pengawasan internal

berperan penting dalam memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dalam setiap proses birokrasi. Selain itu, Dwiyanto (2017) menyatakan bahwa pengawasan publik dan birokratik yang efektif merupakan pilar penting bagi terwujudnya *good governance* karena mempersempit ruang penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Good Governance Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Nilai koefisien jalur menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara *good governance* dan akuntabilitas kinerja OPD dengan nilai $O = 0.503$; $t = 5.373$; $p = 0.000$. Hasil ini mempertegas bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini sejalan dengan Putri dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berperan sebagai faktor penguat dalam menciptakan budaya akuntabilitas di lembaga publik. Selain itu, World Bank (2017) juga menekankan bahwa penerapan *good governance* merupakan fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap sektor pemerintahan.

Good Governance Memediasi Hubungan Antara Pengawasan Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Hasil menunjukkan bahwa *good governance* memediasi hubungan antara pengawasan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Hal tersebut diketahui berdasarkan nilai $O = 0.116$; $t = 2.259$; dan nilai $p = 0.012$. Ini berarti bahwa pengawasan laporan keuangan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan penerapan *good governance*. Penelitian ini mendukung hasil Kusuma dan Mahmud (2022) yang menemukan bahwa peran mediasi *good governance* memperkuat pengaruh mekanisme pengawasan terhadap kinerja sektor publik. Dengan kata lain, pengawasan yang efektif akan mendorong budaya transparansi dan keadilan dalam organisasi, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas kinerja OPD.

Good Governance Memediasi Hubungan Antara Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Nilai *path coefficient* yang diperoleh sesuai data yang diolah ialah $O = 0.342$; $t = 4.226$; $p = 0.000$. Hal tersebut menunjukkan bahwa *good governance* secara signifikan memediasi hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja. Artinya, aparatur yang kompeten tidak hanya meningkatkan akuntabilitas secara langsung, tetapi juga melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini selaras dengan penelitian Sofyani dan Akbar (2020) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja publik melalui mekanisme tata kelola yang baik. Dengan demikian, *good governance* berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan individu dengan sistem akuntabilitas institusional yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dengan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS, penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan laporan keuangan dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran mediasi *good governance*. Temuan ini menegaskan bahwa semakin efektif fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh aparatur, semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah, karena mekanisme pengawasan yang kuat memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundangan, serta prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kompetensi aparatur terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan penerapan *good governance*, yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, tetapi juga integritas moral, profesionalisme, dan pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas publik, sehingga aparatur yang kompeten mampu mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini juga menemukan bahwa *good governance* berperan penting sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengawasan laporan keuangan dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja OPD, membuktikan bahwa efektivitas pengawasan dan kompetensi aparatur tidak serta-merta menghasilkan akuntabilitas tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* menjadi penghubung utama yang memperkuat hubungan antara faktor teknokratis dan hasil kinerja organisasi, sehingga pencapaian kinerja yang akuntabel di lingkungan pemerintah daerah bergantung pada internalisasi nilai-nilai *good governance* dalam budaya birokrasi dan sistem pengelolaan publik. Meskipun memberikan hasil yang signifikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ruang lingkup yang terbatas pada beberapa OPD di wilayah tertentu sehingga belum dapat digeneralisasikan, penggunaan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner yang berpotensi menimbulkan bias persepsi, serta keterbatasan model yang hanya mencakup tiga variabel utama tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, atau sistem penghargaan, dan bersifat *cross-sectional* sehingga belum menggambarkan hubungan sebab-akibat jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian, menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk menggali konteks sosial-organisasional secara lebih dalam, serta menambahkan variabel moderasi atau mediasi seperti *digital governance* atau kepemimpinan etis agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja OPD tidak dapat dilepaskan dari sinergi tiga pilar utama, yaitu efektivitas pengawasan laporan keuangan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penerapan prinsip *good governance* yang

menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi di era reformasi dan digitalisasi saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. Z., & Siregar, H. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 145-160.
- Arifin, Z., & Pratama, R. (2022). *Good Governance sebagai Mediasi Pengaruh Pengawasan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55-68.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D., & Rahmawati, N. (2020). *Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengawasan Internal terhadap Penerapan Good Governance pada Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 33-48.
- Indrayani, D., & Fauzi, A. (2019). *Peran Good Governance dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 331-345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10020>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, Z., & Lubis, R. (2020). *Pengaruh Pengawasan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 112-126.
- Rahmawati, L., & Putra, A. R. (2021). *Determinants of Accountability in Local Government Performance: The Role of Good Governance Practices*. *Journal of Public Sector Management*, 9(3), 45-58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A., & Nugraha, R. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja melalui Good Governance pada Pemerintah Kota Bandung*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 89-102.
- Yuliani, S., & Darwanis. (2019). *Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 77-93.